

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

B. PELAKSANAAN URUSAN WAJIB

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Kondisi Umum

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sejak tahun 2013 s/d tahun 2016 ditangani oleh Dinas Perhubungan dan Informatika. Setelah terbentuk OPD baru, maka pada tahun 2017 penanganan penyelenggaraan urusan ini berada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Penyelenggaran urusan ini dengan visi “mewujudkan masyarakat informasi untuk Sulsel lebih maju, Mandiri dan Moderen” dijabarkan dalam 3 (tiga) Misi

1. Menigkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pemda
2. Meningkatkan kualitas peayanan data dan informasi publik
3. Mewujudkan Pengaman Informasi Pemda melalui persandian

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi informatika Statistik dan persandian penyelarasan revisi penyusunan RPJMD 2013-2018 dimana Pengukuran kinerja diperoleh dari Realisasi indikator kinerja yakni:

Tabel 4.1
Capaian indikator Kinerja Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah layanan Pemerintah Provinsi melalui pemanfaatan teknologi informasi	Layanan					47 Layanan	61 Layanan
2	Persentase Pengelolaan Informasi Publik	Persentase					100	100
3	Persentase Penyelenggaraan Komunikasi Publik	Persentase					100	100

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator

Dalam kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan menggambarkan secara eksploratif capaian kinerja sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA-DPPA) tahun 2018 dimana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan mengelola dana APBD Tahun Anggaran 2018 belanja langsung pada DPA sebesar Rp. 11.888.632.739,- dan DPPA Pokok sebesar Rp. 11.888.632.739,00 terealisasi sebesar Rp. 11.575.633.410,00 atau 97,37 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 312.999.329,- dan realisasi fisik mencapai 100 %

a. Realisasi Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.133.978.644,66 dengan realisasi keuangan Sebesar Rp. 2.108.636.663 atau 98, 81 %, Sasaran program adalah Terwujudnya Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dengan hasil yang dicapai : Terlaksananya pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Diskominfo-SP 100 % melalui Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 152 unit, Terlaksannnya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah Prov.Sulsel, Terlaksananya administrasi kepegawaian selama 1 (satu) tahun.

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.571.939.200 dengan realisasi keuangan Sebesar Rp. 1.484.782.460 atau 94,46 %, Sasaran program adalah Peningkatan Meningkatnya kapasitas dan kinerja SKPD dalam pelaksanaan tugas dengan hasil yang dicapai tersediannya sarana dan prasarana penunjang SKPD, mengikuti pelatihan, sosialisialisasi dan Bintek.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD.

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 303.010.600,34 dengan realisasi keuangan Sebesar Rp. 302.717,372 atau 99,90 %, Sasaran program adalah Terwujudnya Pelaksanaan kinerja yang optimal dengan hasil yang dicapai 100 % .

Dokumen perencanaan dan anggaran 5 (lima) Dokumen, Laporan Realisasi Fisik dan keuangan 12 (dua belas) laporan, laporan monev Renja 4 (empat) laporan dan pelaksanaan Forum SKPD diikuti 112 Orang.

4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.860.704.153 dengan realisasi keuangan Sebesar Rp. 3.828.722.692 atau 99,17 %, Sasaran program adalah Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi (TIK) dalam mendukung pelayanan publik dengan hasil yang dicapai 47 layanan dengan capai kegiatan : pelaksanaan pameran pembangunan daerah, 1 kali, pembangunan system monitoring website pada domain Sulsel Prov.go.id 1 (satu) layanan, tersediannya jaringan Internet pada 18 OPD lingkup Kantor Gubernur, terlaksananya layanan aplikasi dan Website pada 53 OPD, Penyediaan Jasa Bandwith lingkup kantor Gubernur 180 Mbps, Assement Implementasi TIK Pemerintah Prov.SulSel 1 Dokumen, Roadmap Pengembangan TIK Pemprov.SulSel 1 Dokumen, Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan TIK 3 Rekomendasi.

5. Program Pengembangan Data dan Informatika

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 624.593.002 dengan realisasi keuangan Sebesar Rp. 593.087.512 atau 94,96% sasaran program adalah Terwujudnya Ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan data dan informasi publik dengan hasil yang dicapai : sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang statistik sektoral 178 orang terdiri dari SKPD Prov.SulSel dan 24 Kab/Kota, 1 Laporan Survei pengembangan data dan Informasi Statistik Sektoral, Penyusunan Kompilasi data statistik Sektoral 1 laporan, Pengumpulan dan Updating Data Statistik Sektoral 1 (satu) laporan, Pengolahan dan Analisis Data dan Informasi Statistik Sektoral 1 (satu) Laporan, Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Kerjasama statistik sektoral 1(satu) Dokumen, 1 (satu) aplikasi Pengolahan data dan Informasi Statistik Sektoral.

6. Program Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi.

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.394.407.139 dengan realisasi keuangan Sebesar Rp 3.257.686.711 atau 95,97%. Sasaran program adalah meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi (TIK) dalam mendukung pelayanan public dengan hasil yang dicapai : Pengelolaan Opini Publik pada 4 media (TV, Radio, Surat Kabar, Media On Line), Layanan manajemen data dan Informasi Pemerintah Provinsi SulSel 1 layanan, pemenuhan dan pengembangan manusia sandi 250 (dua ratus lima puluh) orang, pengelolaan informasi 1 (satu) layanan,

pengelolaan integrasi system informasi 1 (satu) laporan, pelaksanaan Komisi Informasi Prov.SulSel 1 (satu) laporan, pelaksanaan dan tata kelola informasi 1 Dokumen, Bimtek PPID sebanyak 108 (Seratus Delapan) orang.

20 URUSAN PERSANDIAN

Gambaran Umum

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang Provinsi Sulawesi Selatan di urusan pemerintahan bidang persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi.

Pengelolaan persandian di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Bidang Persandian Yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di antaranya melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas, melaksanakan penatalaksanaan persuratan berita rahasia, melaksanakan pengamanan berita atau informasi yang bersifat rahasia dan berklasifikasi, mengadakan serta memelihara peralatan dan sistem sandi, melakukan komunikasi, koordinasi persandian, dan mengamankan sinyal frekuensi dan jaringan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pelayanan koordinasi persandian dengan jajaran persandian Se Sulawesi Selatan diwadahi dengan PERKA Lembaga Sandi Negara No.7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Penanganan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kab./Kota.

Pelaksanaan urusan persandian meliputi:

- 1) Tata Kelola Persandian
- 2) Operasional Pengamanan Persandian
- 3) Pengelolaan Sumberdaya Persandian
- 4) Pengamanan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

Realisasi kinerja dari urusan ini pada tahun 2018 adalah Terwujudnya Pengembangan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pengamanan Penyelenggaraan persandian pada OPD Prov Sulsel	OPD					61	61

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi.

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 725.591.539,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp . 625.672.172,- Sasaran program adalah Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah. dengan hasil yang dicapai Layananan Jaringan Komunikasi Sandi 54 OPD, 24 Kab/Kota Prov.SulSel, Diseminasi Informasi melalui media 11 program prioritas, layanan maintenance jaringan komunikasi 1 central PABX, Repeater,HT, SSB, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian pada OPD dan 24 Kab./Kota.

24 URUSAN STATISTIK

b. Gambaran Umum

Urusan Statistik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan konkuren yang wajib dilaksanakan dan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah Perda Nomor 10 Tahun 2016dibentuklah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai Pelaksana Teknis urusan ini agar penyajian data statistik sektoral ebih baik, melalui upaya diantaranya:

- 1) Menginisiasi pengembangan Sistim Informasi Statistik Terpadu (*Statistic Integrated Information System*) yang dapat interkoneksi dengan sistem di Kabupaten/Kota menuju satu data pembangunan, dengan langkah awal pelaksanaan Forum Koordinasi dan Kerjasama Statistik sektoral
- 2) Melakukan pendataan dan analisis, sehingga urusan statistik tidak hanya terfokus pada data sekunder, melakukan pendataan primer yang bersumber dari agen data sesuai dengan kewenangannya sebagaimana di atur dalam Undang-undang Statistik;
- 3) Mendorong pemanfaatan data dan informasi yang lebih optimal oleh masyarakat termasuk oleh OPD di Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan Updating, Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statisti Sektoral.

Selanjutnya, realisasi Kinerja Sasaran Urusan Statistik pada kurun waktu tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Ketersediaan Data Statistik Sektoral dalam Mendukung Perencanaan Kinerja
Urusan Statistik Tahun 2018 (%)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
5	Persentase ketersediaan Data/Informasi Statistik	Persentase					100	100

Realisasi Program dan Kegiatan

7. Program Pengembangan Data dan Informatika

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 624.593.002 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 593.087.512 atau 94,96 %, Sasaran Program adalah Terwujudnya Ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan data dan informasi publik dengan hasil yang dicapai : sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang statistik sektoral 178 orang terdiri dari SKPD Prov.SulSel dan 24 Kab/Kota, Survei pengembangan data dan Informasi Statistik Sektoral 1 Laporan, penyusunan Kompilasi data statistik Sektoral 1 laporan, Pengumpulan dan Updating Data Statistik Sektoral 1 (satu) laporan, Pengolahan dan Analisis Data dan Informasi Statistik Sektoral Layanan Statistik Sektoral, Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Kerjasama statistik sektoral 1(satu) Dokumen, Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral 1 (satu) Dokumen.

c. Permasalahan dan solusi Statistik

Permasalahan

- 1) Kurangnya ketersediaan data pada OPD
- 2) Rendahnya Sumber daya pengelola data
- 3) Belum adanya aplikasi yg mendukung penyusunan data statistik sektoral terintegrasi

Solusi :

- 1) Perlunya setiap OPD menyiapkan Staf yang menangani data OPD
- 2) BinteK/Sosialisasi terkait pengelolaan data, pengoleksian dan metode pengumpulan data
- 3) Pembuatan aplikasi data Statistik Sektoral

d. Permasalahan dan solusi Komunikasi

Permasalahan

1. Sinergitas Program dengan pusat belum optimal hal ini dikarenakan pembentukan Dinas Kominfo-SP Prov.SulSel pada Tahun ke IV Pelaksanaan RPJMD 2013-2018 Prov.Sulsel, hal ini berdampak belum sinkron program sesuai pelimpahan kewenangan ke Provinsi berdasar NSPK.
2. Rendahnya dukungan anggaran sehingga penyediaan jaringan untuk akses internet bagi OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, baru direncanakan pada TA. 2019.
3. ketersediaan data Belum ada standar Operasional Prosedur yang akurat sebagai acuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan
4. Masih lemahnya sinergitas pola kerja antar SKPD dalam lingkup pemerintah daerah secara maksimal, sehingga masih terdapat kecenderungan kegiatan yang bersifat mandiri, menyebabkan daya dorong terhadap tercapainya impact (dampak) dari program kegiatan belum maksimal
5. Kualitas SDM belum memenuhi standar kapabilitas yang mencukupi, sehingga pencapaian kinerja belum optimal.

Solusi :

1. Perlunya memperhatikan dalam penyusunan Dokumen perencanaan pada periode penyusunan RPJMD 2018-2023 sinergitas program Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
2. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) administratif masing-masing Dinas Penetapan SOP sebagai sebuah peraturan yang mengikat bagi seluruh unsur yang ada di setiap organisasi/satuan/unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan dapat diaplikasikan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap tingkatan organisasi
3. Meningkatkan koordinasi antar OPD dan internal OPD sehingga dapat memperjelas target tujuan pada peningkatan capaian kinerja bagi OPD.
4. Meningkatkan kualitas SDM ASN Diskominfo-SP melalui pelaksanaan Bimtek, Diklat dan pengembangan Sumberdaya manusia lainnya, guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Makassar, Januari 2019

Kepala Dinas Kominfo-SP Prov.SulSel

Ir.H.ANDI HASDULLAH,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19610420 198603 1 022

